

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan khususnya dalam mediasi perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam proses mediasi Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Bandung Barat?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat proses mediasi dalam perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Bandung Barat?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan mediasi perselisihan hubungan industrial?

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Charles Jones yang meliputi organisasi, interpretasi (penafsiran), dan aplikasi (penerapan).

Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Bandung Barat dapat berjalan optimal apabila melaksanakan organisasi, interpretasi dan aplikasi (penerapan).dalam proses penyelesaian konflik/perselisihan hubungan industrial melalui mediasi

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan khususnya dalam Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat belum optimal, dengan indikasi-indikasi; minimnya sumberdaya mediator yang melayani mediasi perselisihan hubungan industrial, belum dibuatnya mekanisme pembagian tugas bagi mediator yang melaksanakan mediasi perselisihan hubungan industrial serta mekanisme penyelesaian perselisihan melalui mediasi yang belum jelas dan terperinci.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan, Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial